



REFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA PASKA EODB

Fararatri Widyadari

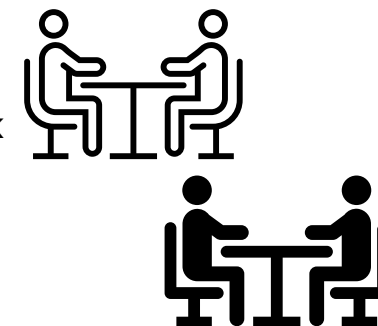
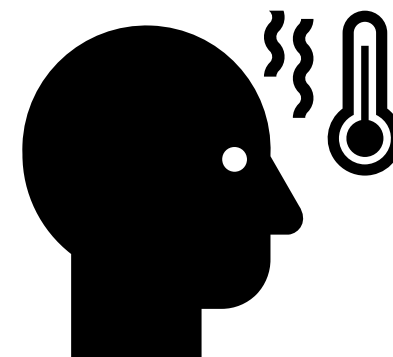
Disampaikan dalam FGD:
“Prospek Reformasi Hukum Bisnis Indonesia Pasca Penghentian
Sementara Indeks Ease of Doing Business”

Jakarta, 2 November 2021

WHAT GETS MEASURED GETS DONE

Doing Business Sebagai “Pengukur Suhu” dan “Pembuka Pintu” Diskusi Reformasi Iklim Usaha

- Pengukuran dan pelaporan yang dilakukan secara reguler dan terstandarisasi membuat upaya reformasi menjadi terfokus dan terukur:
 - **Area yg bermakna bagi kegiatan berusaha:** menggunakan kasus studi dan asumsi standar untuk memotret 10 siklus usaha mulai proses mendirikan usaha hingga penutupan usaha.
 - **Merekam efektivitas reformasi yang terselenggara:** menyediakan baseline untuk mengukur perkembangan menuju sasaran capaian setiap tahun dan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
- Menyajikan informasi mengenai praktik terpuji dan merekam perjalanan reformasi dari negara-negara yang berhasil melakukan lompatan maju dalam hal peningkatan kemudahan berusaha:
 - **Koordinasi lintas instansi:** dalam proses perencanaan/perumusan rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah, serta pelaksanaan reformasi regulasi dan pelayanan publik.
 - **Keterlibatan sektor swasta:** dalam mengidentifikasi peluang perubahan dan mendukung penyelenggaraan reformasi.



MENDUKUNG KEBIJAKAN BERBASIS DATA

Penetapan topik strategis
dan indikator ukuran
yang menjadi fokus,
berikut metodologi
penghimpunan data
(baselining)



Pemetaan
Regulasi
dan
Kebijakan

Peran
Kementerian/
Lembaga/
Daerah

KOORDINASI

Konsultasi
dengan
Pemangku
Kepentingan

Identifikasi Peluang
Perbaikan &
Praktik Terpuji
(Rencana Aksi)

Pelaksanaan
Rencana Aksi
Reformasi &
Sosialisasi

Konsultasi
dengan
Pemangku
Kepentingan
(Monev)



ILUSTRASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI

Kemudahan Berusaha di Indonesia

- **Inovasi layanan publik di daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu:** single filing untuk SIUP dan TDP (*Starting a Business*), koordinasi proses permohonan dan penerbitan perizinan untuk mendirikan bangunan (*Dealing with Construction Permits*).
- **Harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan proses/persyaratan:** penyederhanaan persyaratan yang tumpang tindih seperti persyaratan surat keterangan domisili (*Starting a Business*); Salinan sertifikat hak atas tanah yang telah di legalisasi notaris (*Dealing with Construction Permits*), pertukaran data untuk mendorong efisiensi validasi pajak dan pendaftaran tanah dan bangunan sebagai obyek pajak (*Registering Property*), modernisasi sistem pelaporan pajak (*Paying Taxes*), pertukaran data untuk meniadakan duplikasi persyaratan dokumentasi dan optimalisasi platform online, Ekosistem Logistik Nasional (*Trading Across Borders*).
- **Penyempurnaan kebijakan untuk optimalisasi dampak dan manfaat:** modernisasi sistem pendaftaran jaminan fidusia dan perluasan cakupan data debitur (*Getting Credit*), mekanisme gugatan sederhana dan modernisasi sistem peradilan (*Enforcing Contracts*).

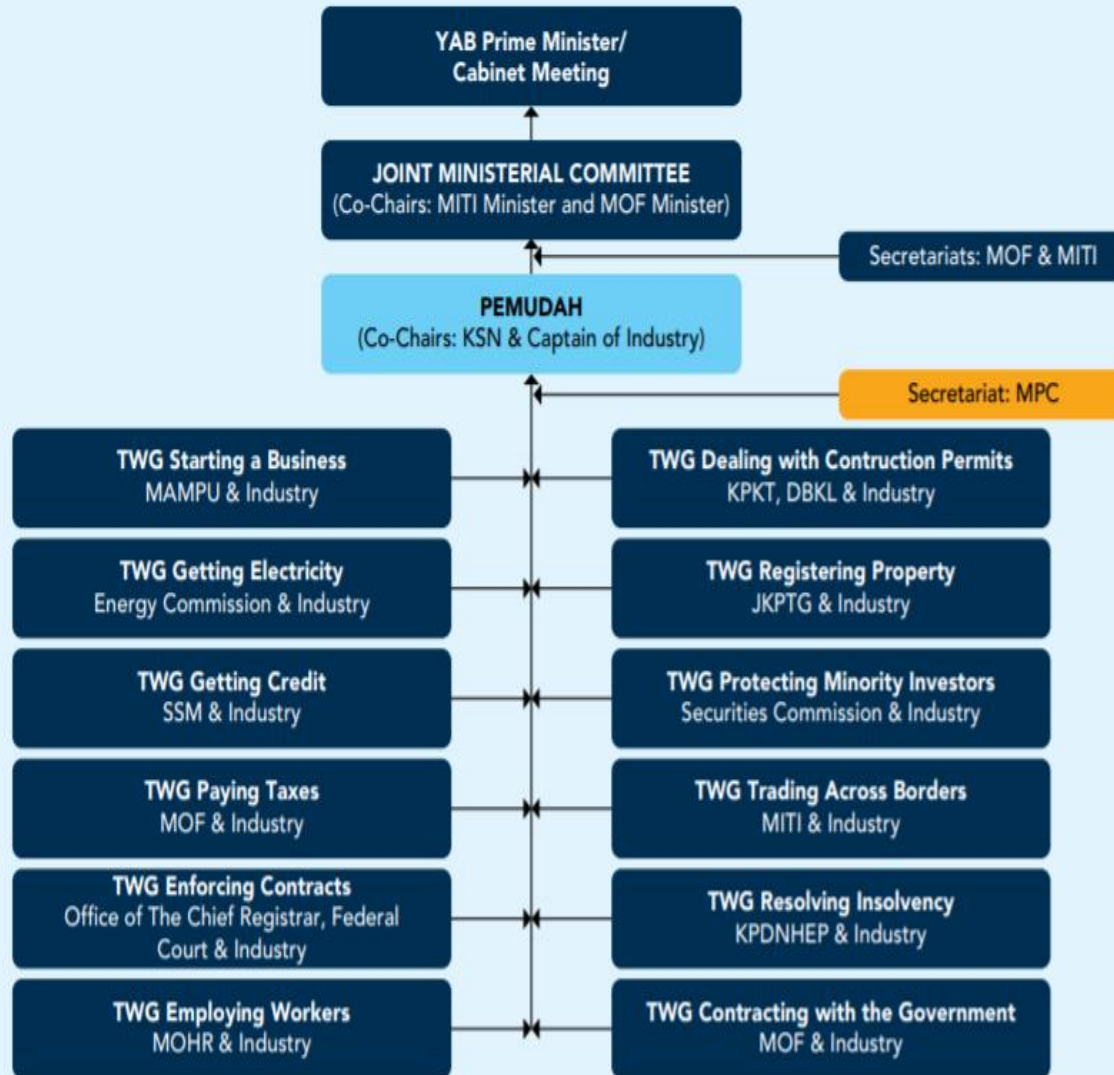


PENTINGNYA MELIBATKAN SEKTOR
SWASTA: PENERIMA MANFAAT
(*BENEFICIARIES*) DAN PROFESI
PENUNJANG (*ENABLER*) DALAM
DIALOG REFORMASI

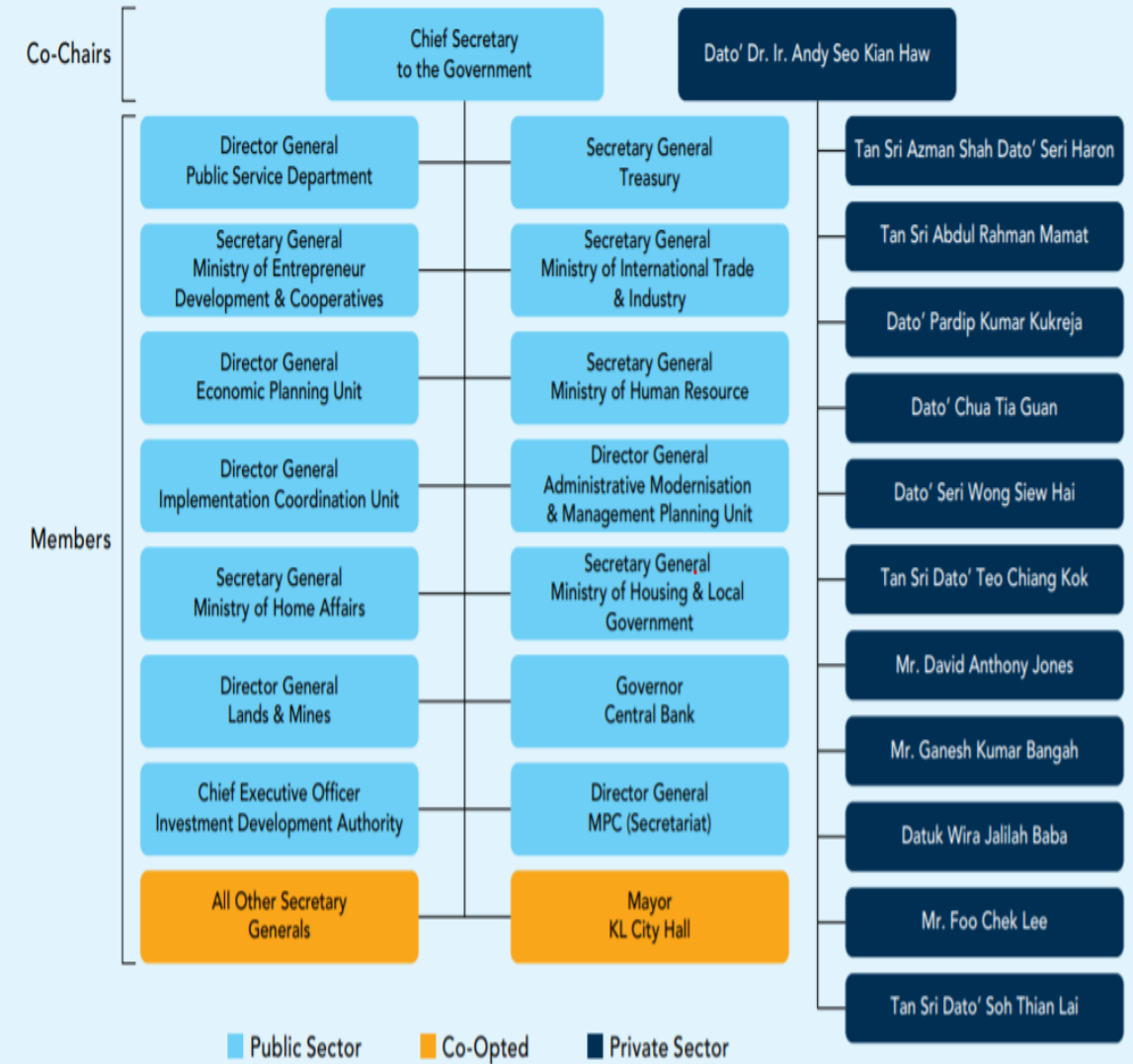
“Even the best-
intentioned
government cannot
succeed without a
collaborative and
motivated private
sector”

(Andres Rodriguez-Clare,
2004)

GOVERNANCE STRUCTURE



PEMUDAH MEMBERS



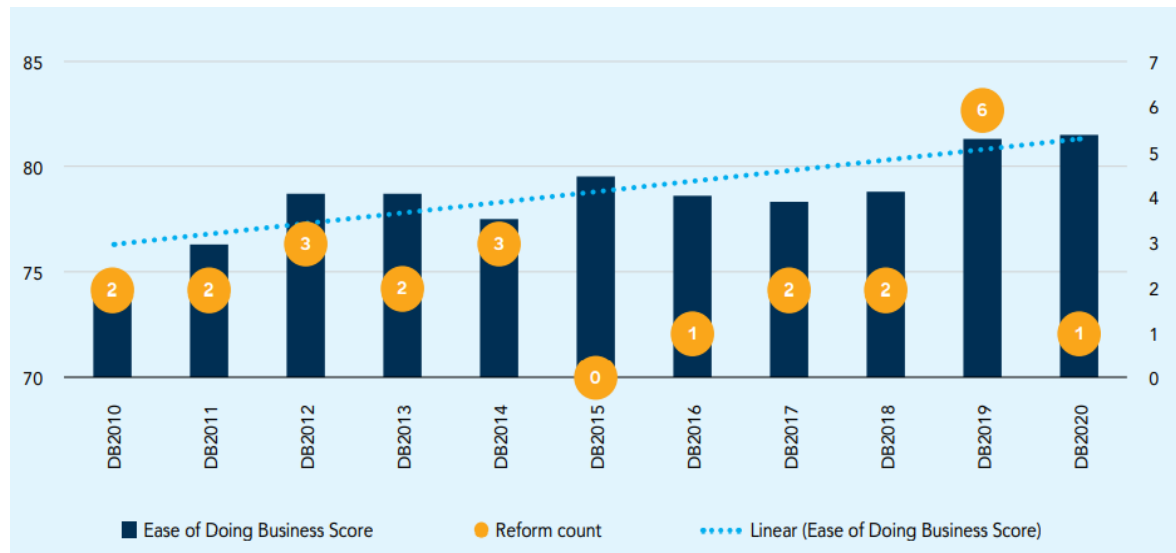
PEMUDAH

Sumber: Public-Private Dialogue in Business Regulation Reform: A Case Study on PEMUDAH, World Bank Group, Mei 2020

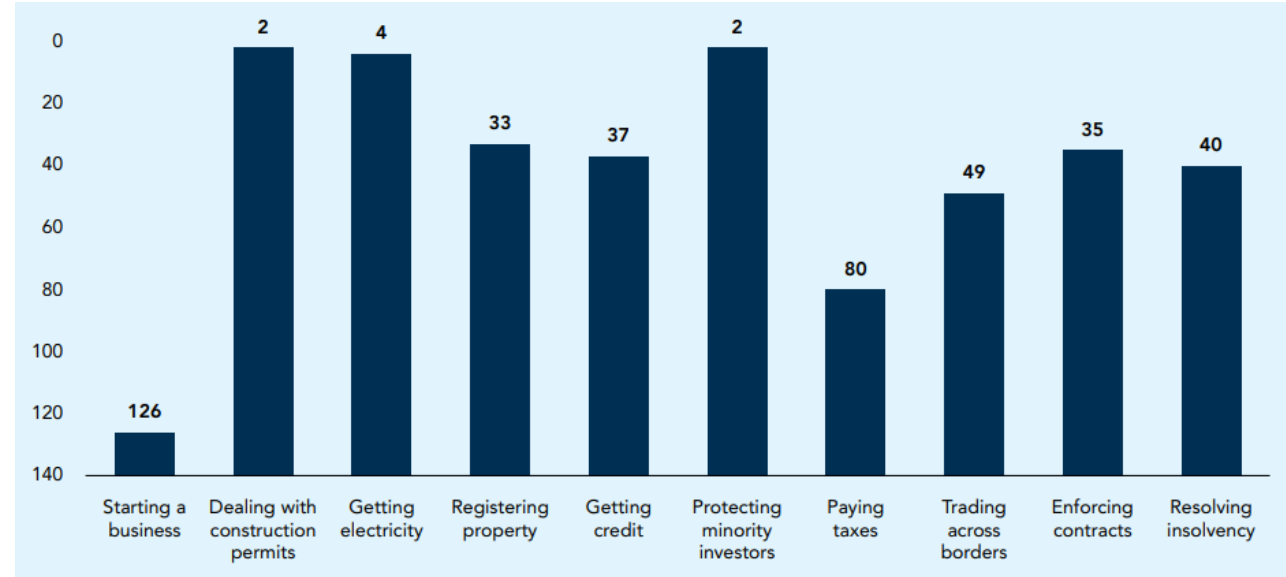
GUGUS TUGAS PEMUDAH DI MALAYSIA

Prestasi sejak PEMUDAH resmi beroperasi (tahun 2007)

Doing Business 2009-2019



Doing Business 2020

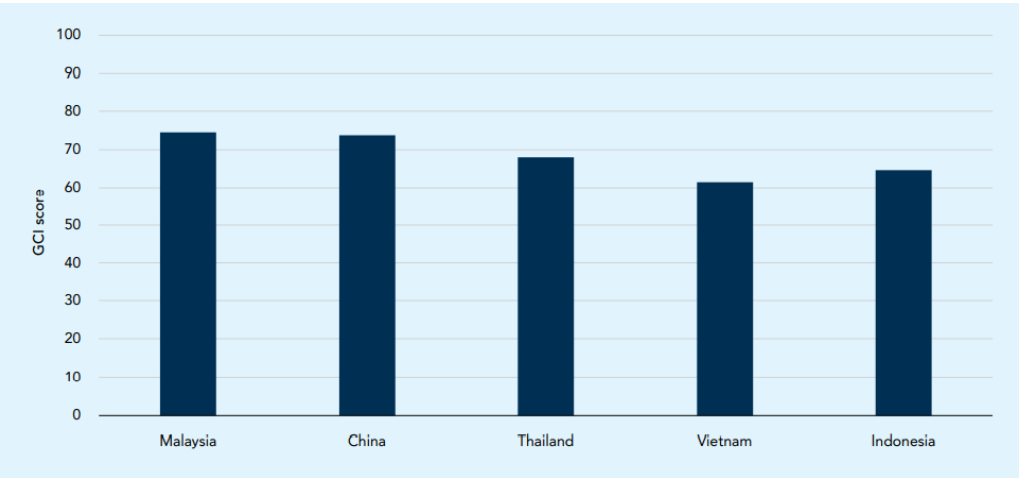


Sumber: Database Doing Business

GUGUS TUGAS PEMUDAH DI MALAYSIA

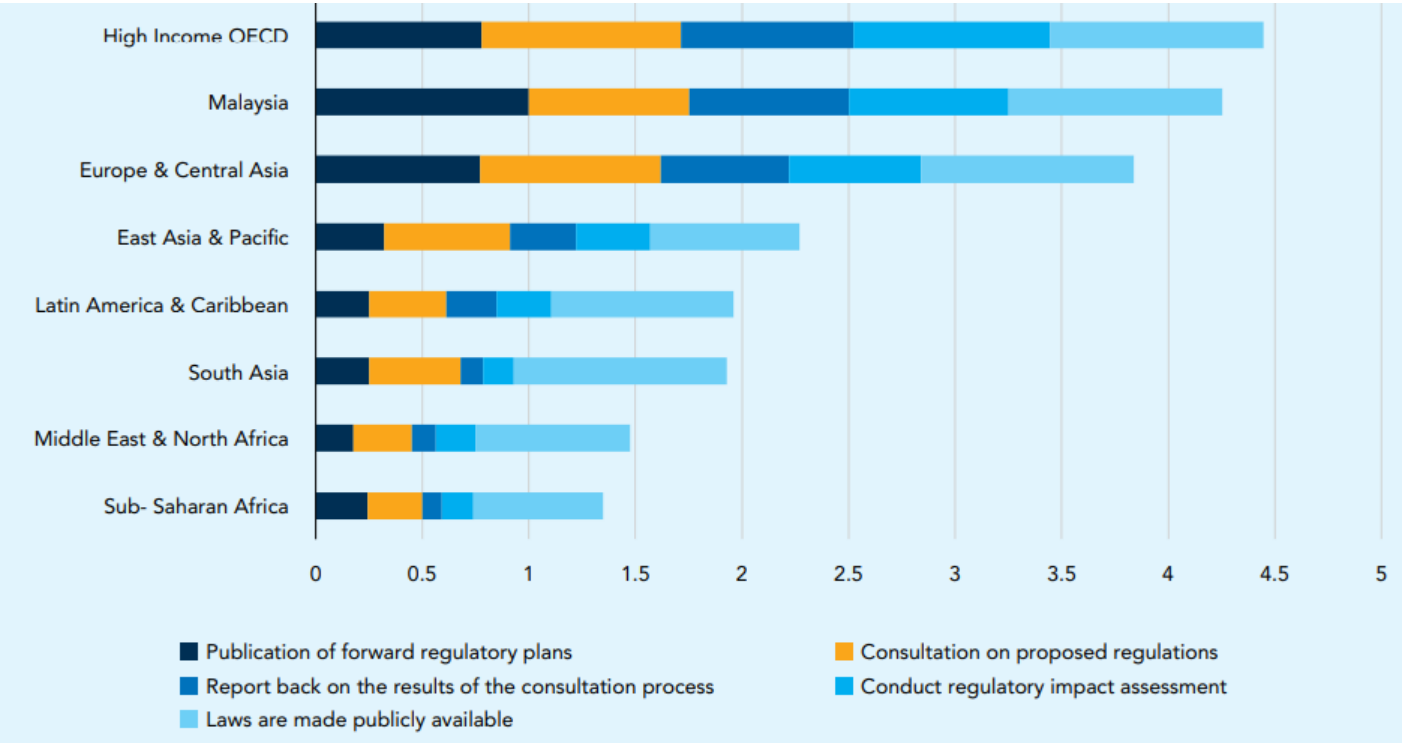
Prestasi sejak PEMUDAH resmi beroperasi (tahun 2007).....lanjutan

Global Competitiveness Index (2019)



Sumber: Database Global Competitiveness Index, World Economic Forum

Global Indicators of Regulatory Governance



Sumber: Database World Bank Global Indicators of Regulatory Governance, www.rulemaking.worldbank.org

PELUANG KEDEPAN

Indikator Kemudahan Berusaha sebagai penunjang agenda reformasi iklim usaha yang lebih luas



Penghimpunan data yang tervalidasi dan mengkaji praktik-praktik di negara lain sebagai pemicu diskusi kebijakan (*evidence based policy*) guna mendorong reformasi regulasi dan optimalisasi layanan publik

Pendekatan Reformasi Yang Terkoordinasi dan Responsif Menuju Sasaran Yang Jelas



Keselarsan agenda kebijakan dan peran serta instansi di tingkat pusat dan daerah (*whole of government approach*)

Mekanisme Feedback dan Dialog Pemerintah dan Pelaku Usaha/Pemangku Kepentingan



Melibatkan pelaku usaha/pemangku kepentingan dalam proses validasi data, identifikasi hambatan implementasi, peluang penyempurnaan dan perumusan kebijakan



**“REFORM IS A
PROCESS, NOT AN
EVENT”**

(KOFI ANNAN)

TERIMAKASIH